

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Penduduk Miskin**

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang secara finansial tidak mampu untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran. Rata – rata pengeluaran per kapita bulanan pada penduduk miskin dibawah garis kemiskinan (GK).

Dari sisi ekonomi, kemiskinan merupakan bentuk pendapatan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dasar. Kemiskinan dimensi ekonomi didefinisikan sebagai kurangnya sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan, baik secara finansial maupun jenis kekayaan lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat (Suryawati, 2004:123). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek yang mempengaruhi kemiskinan dari segi ekonomi yaitu dimensi pendapatan diukur menggunakan pendapatan per kapita dan dimensi konsumsi diukur menggunakan Garis Kemiskinan (GK).

Dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, sehingga sejak jaman order baru hingga saat ini pemerintah Indonesia berupaya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan jumlahnya dapat menurun.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), Garis kemiskinan (*poverty line*) mencerminkan pengeluaran minimum dalam rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama sebulan, dan untuk makanan dan kebutuhan lainnya. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan pangan, yang setara dengan 2100 kilokalori per penduduk per hari serta paket sembako diwakili oleh 52 jenis barang (sereal, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) adalah nilai minimum pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket kebutuhan pokok bukan makanan diwakili oleh 51 kategori barang di perkotaan dan 47 kategori barang di pedesaan.

Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK):

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Menurut Saleh (2002), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah diantaranya:

a. Produk Domestik Bruto (PDRB) Per Kapita

Tingkat pendapatan per penduduk di suatu wilayah mencerminkan perspektif distribusi pendapatan berdasarkan nilai rata-rata pendapatan rumah tangga dalam perekonomian wilayah. Pendapatan per kapita menggambarkan kapasitas pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah tersebut. Jika pendapatan per penduduk meningkat, maka kemampuan pendapatan rata-rata penduduk di wilayah tersebut juga meningkat. Artinya, kemampuan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok di daerah juga meningkat. Jika kemampuan memenuhi kebutuhan dasar meningkat, maka jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, jika pendapatan per penduduk di suatu wilayah menurun, maka kemampuan pendapatan rata-rata penduduk di wilayah tersebut juga menurun. Seiring dengan melemahnya kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, jumlah penduduk miskin di daerah akan meningkat.

b. Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan

Pengeluaran ini mencakup semua pengeluaran untuk program-program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah. Semakin tinggi pengeluaran pembangunan publik, semakin tinggi pula kemakmuran yang dicapai oleh penduduk daerah tersebut begitu pula sebaliknya jika pengeluaran pemerintah untuk pembangunan publik rendah maka kemakmuran yang dicapai penduduk daerah semakin rendah juga yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan.

Kuncoro (2003) menyebutkan bahwa dari segi ekonomi, terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tingkat mikro, kemiskinan disebabkan oleh struktur kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata.
- b. Kemiskinan berasal dari perbedaan akses terhadap modal
- c. Kemiskinan bersumber dari perbedaan kualitas sumber daya manusia

### **2.1.2 Pernikahan Dini**

Perkawinan anak secara umum adalah perijodohan atau perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak, sebelum seorang perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis mampu memikul beban perkawinan dan melahirkan anak, batas usia umumnya di bawah 18 tahun (BKKBN, 2012).

Al Ghifari (dalam Deisyanti, 2015) menyatakan bahwa perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Muda dalam hal ini berarti berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sedangkan Romauli (2009) menyatakan bahwa perkawinan remaja adalah perkawinan yang dilakukan bagi perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dan laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun.

Menurut Kampono (2007), dari segi kesehatan pernikahan muda yang ideal adalah pernikahan wanita di atas 20 tahun, karena wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun berisiko terkena kanker serviks, dan sel-sel serviks belum matang di usia remaja. Jika terpapar *human papilloma virus* (HPV) maka sel akan berubah menjadi kanker.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Khaerani (2019) menyatakan bahwa terdapat aspek – aspek yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu:

a. Putus Sekolah

Pelaku perkawinan anak ingin tetap bersekolah namun terhalang oleh peraturan yang tidak memperbolehkan anak melanjutkan sekolah jika sudah menikah. Tentu saja akibatnya remaja yang menikah dini akan kehilangan kesempatan belajar ilmu untuk bekal di kemudian hari. Pelaku perkawinan menyadari bahwa setelah mereka menikah, mereka tidak akan dapat melanjutkan pendidikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan terabaikan karena keinginan atau paksaan untuk menikah

b. Kemiskinan

Beberapa orang tua pelaku berharap pernikahan putrinya menjadi solusi untuk meringankan keuangan keluarga, karena suami bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Namun, hal ini seringkali tidak berhasil jika keadaan ekonomi keluarga perempuan dan laki-laki sama. Bertambahnya jumlah keluarga yang ada menciptakan tekanan ekonomi yang lebih besar pada rumah tangga dan dengan sumber pendapatan yang rendah atau tidak ada, sehingga sulit bagi mereka untuk tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan munculnya babak baru kemiskinan dalam keluarga. Apalagi jika tidak ada persiapan dari sudut pandang ekonomi.

c. Kesehatan

Banyak orang tua dari pelaku pernikahan dini tidak mengetahui bahaya yang ditimbulkan. Alat reproduksi wanita yang belum matang menjadikan wanita belum siap melakukan hubungan seksual dan mengandung. Hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit seperti bayi prematur, gizi buruk pada bayi, stunting, dan kecerdasan rendah pada bayi.

d. Masa depan tidak baik dan kurang mampu dalam mengurus keluarga.

Dalam menghadapi pernikahan, setiap pasangan harus siap secara rohani. Kesiapan dan kematangan mental ini biasanya baru tercapai pada usia 20 tahun. Oleh karena itu, dikhawatirkan keputusan menikah merupakan keputusan remaja yang jiwa dan pikirannya belum stabil. Ketika mereka tidak mampu beradaptasi, muncul berbagai masalah dalam hubungan keluarga dan masyarakat, seperti perempuan kurang berpendidikan yang tidak mampu mendidik anaknya sehingga tumbuh kembang anak menjadi kurang baik dan merugikan masa depannya.

Terkait dengan pernikahan dini tersebut terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayadiningrat terdapat penyebab utama dalam pernikahan dini yaitu ingin segera mendapatkan anggota keluarga baru dan konsekuensi mengerikan dari pernikahan dini tidak dapat dipahami oleh pengantin wanita itu sendiri dan keturunannya (Fatimah dalam hatmah dkk, 2018)

Menurut (Mubasyaroh, 2017) sering kita jumpai di masyarakat, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong pernikahan dini dapat terjadi yaitu:

a. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan anak di bawah umur cenderung melakukan pernikahan tanpa memikirkan secara jangka panjang akibat dan dampak dari permasalahan yang mereka hadapi.

b. Ekonomi

Kondisi perekonomian yang rendah mendorong terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang kurang mampu akan cenderung menikahkan anak mereka pada usia muda karena mereka berpikir dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan terbebas dari masalah ekonomi. Selain itu, kondisi keuangan yang rendah dan kemiskinan membuat orang tua tidak mampu mengurus kebutuhan anaknya dan membayar biaya sekolah, sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya berhadapan dengan melepaskan diri dari tanggung jawab membiayai kehidupan anaknya dengan harapan bahwa anak-anak mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian, kesulitan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak, guna mengurangi beban ekonomi keluarga.

c. Orang Tua

Rendahnya pendidikan orang tua menimbulkan pemikiran pasrah dan menerima. Hal ini yang membuat orang tua belum memahami dengan baik tentang Undang – Undang perkawinan No 1 tahun 1974. Orang tua memiliki banyak alasan untuk menikah dini dengan anaknya, karena takut

anakny menjadi pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin memperpanjang hubungan dengan kerabat dan menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya dengan alasan bahwa harta yang dimilikinya bukan milik oleh orang lain tetapi milik keluarga.

Menurut Romauli (2009), perkawinan yang dimulai pada usia muda biasanya menimbulkan masalah-masalah berikut:

a. Secara Biologis

- 1) Organ reproduksi belum siap menerima kehamilan, sehingga bisa muncul berbagai komplikasi. Mereka lebih jarang berhubungan seks dan menggunakan kondom karena risiko kesehatan seperti kehamilan dini, serta penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
- 2) Kematian ibu hamil dan melahirkan pada usia 20 tahun kebawah adalah 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan usia 20-29 tahun

b. Secara Psikologis

Secara umum, pasangan muda masih belum matang secara mental sehingga tidak stabil dengan masalah yang muncul dalam pernikahan mereka. Dampak psikologis dari pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan alasan pernikahan. Pernikahan dini terkait dengan tekanan keluarga, status keuangan, kehamilan pranikah dan tekanan pasangan. Meskipun wanita tersebut tidak didiagnosis dengan gangguan mental sebelum menikah, hal itu dapat berkembang selama pernikahan. Gangguan mental yang timbul meliputi depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar.

c. Secara Sosial Ekonomi



Pernikahan dini dengan mudah menyebabkan keluarga miskin karena tingkat pendidikan yang rendah dan akses pekerjaan yang buruk. Kurangnya persiapan keuangan dengan mudah mengubah keluarga baru menjadi keluarga miskin terlebih ketika pasangan tersebut menikah dini dan mengalami kehamilan kemudian memiliki anak. Kebutuhan semakin mendesak, sementara kapasitas menjadi orang tua tidak berubah. Pada akhirnya terjadi perceraian karena kegagalan finansial dalam keluarga.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan pada usia muda menimbulkan dampak ekonomi yaitu ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya karena kurangnya faktor pendidikan sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka terus membutuhkan banyak bantuan keuangan dari orang tua mereka yang membuat mereka tidak mampu hidup mandiri sepenuhnya.

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menekankan orang serta kemampuan mereka dan digunakan sebagai kriteria utama untuk menilai kemajuan di wilayah atau negara yang bersangkutan bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja (Badan Pusat Statistik, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diluncurkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 kemudian diterbitkan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi

kualitas sumber daya manusia, akan semakin memberikan kontribusi bagi kemajuan negara atau daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator terpenting untuk mengukur keberhasilan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menentukan apakah suatu negara masuk kategori negara maju atau terbelakang dan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pencapaian tujuan pembangunan yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia sangat bergantung pada pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016)

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, meningkatkan kemampuan manusia seperti kesehatan, pendidikan dan bakat. Kedua, penggunaan bakat mereka, seperti kegiatan santai, tujuan produktif atau keterlibatan budaya, sosial dan politik. Ketika skala pembangunan manusia tidak seimbang, ada kemungkinan ketidakstabilan (BPS, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tolok ukur yang terus berkembang dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga gambaran pembangunan tidak selalu sempurna. Menurut *Human Development Report* (1993), Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu:

a) Indeks Harapan Hidup (*Longevity*)

Indikator ini mengukur menggunakan kriteria perhitungan angka harapan hidup saat lahir (AHHL) dengan angka kematian per seribu penduduk (*infant mortality rate*)

b) Indeks Pendidikan (*Educational Achievement*)

Pengukuran dengan dua indikator adalah angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (angka melek huruf orang dewasa) dan rata-rata jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang masih bersekolah (rata-rata lama sekolah).

c) Indeks Hidup Layak (*Access to Resource*)

Pengukuran pada indikator ini menggunakan indikator angka pengeluaran riil perkapita atau menggunakan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan peringkat dengan kategori sebagai berikut:

- Tinggi: IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas: IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah: IPM antara 50,0 – 75,9
- Rendah: IPM kurang dari 50,0

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa baik negara atau wilayah tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki manfaat penting yaitu:

1. Mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. Menentukan ranking atau tingkat perkembangan suatu daerah

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena IPM tidak hanya sebagai ukuran efisiensi pemerintah tetapi juga digunakan sebagai alokasi untuk menentukan dana alokasi umum (DAU).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia memiliki tiga indikator gabungan yang mengukur ukuran Indeks Pembangunan Manusia suatu negara:

1. Pengukuran tingkat kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

2. Pengukuran tingkat pendidikan menggunakan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{AMH} = \frac{AMH - AMH_{min}}{AMH_{max} - AMH_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{AMH} - I_{RLS}}{2}$$

3. Pengukuran tingkat standar hidup layak menggunakan tingkat pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran_{min})}{\ln(Pengeluaran_{max}) - \ln(Pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata – rata geometris untuk indikator kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

#### **2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita**

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), PDRB adalah semua barang dan jasa yang diproduksi sebagai hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam negeri, tanpa memandang apakah faktor-faktor produksi tersebut berasal atau dimiliki oleh penduduk suatu wilayah, baik merupakan hasil produksi dalam negeri wilayah tersebut. Produk domestik regional bruto dengan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa, yang ditentukan dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa setiap tahun yang dihitung berdasarkan harga

PDRB per kapita merupakan pembagian dari PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal pada daerah tersebut. PDRB per kapita dapat mencerminkan pendapatan rata – rata tiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan penduduk pada daerah tersebut di masa yang akan datang. PDRB per kapita atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tiap penduduk yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun tersebut, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan merupakan nilai tambah setiap penduduk atas barang

dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2018).

Menurut Nugraheni (Husna, 2015) menyebutkan bahwa dalam mengukur pembangunan ekonomi memerlukan alat pengukur yang tepat, salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita lebih baik digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi karena lebih akurat mencerminkan kesejahteraan penduduk negara atau wilayah tersebut. PDRB per kapita merupakan pembagian antara PDRB suatu wilayah dan jumlah penduduk yang tinggal pada wilayah tersebut. PDRB per kapita menggambarkan pendapatan rata – rata setiap penduduk pada tahun tersebut, kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, serta dapat memprediksi tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut pada masa yang akan datang.

Menurut Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan (2020), menyebutkan bahwa PDRB per kapita dapat berfungsi sebagai pendapatan per kapita yang dimana setiap peningkatan daya beli masyarakat dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan inflasi. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB per kapita pada suatu wilayah, maka masyarakat di wilayah tersebut akan semakin sejahtera.

#### **2.1.5 Hubungan Antara Kemiskinan dan Pernikahan Dini**

Menurut Rahmi Martina (2020), pernikahan dini juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan masyarakat yang melakukan pernikahan dini biasanya berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan tentang

implikasi pernikahan di bawah umur seperti perceraian, serta psikologis belum matang. Kebutuhan finansial kurang dalam kehidupan keluarga yang membuat mereka tidak mampu menghadapi masalah dalam keluarga yang dapat menyebabkan mereka menjadi keluarga miskin.

### **2.1.6 Hubungan antara Kemiskinan dan PDRB Per Kapita**

Menurut Norton (2002), ketika pertumbuhan PDRB yang tinggi diikuti oleh pertumbuhan PDRB per kapita yang juga tinggi, maka hal itu menunjukkan adanya pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pengumpulan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah berbuat lebih banyak untuk orang miskin. Pendekatan pembangunan tradisional diartikan sebagai pembangunan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota (Kuncoro, 2006).

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber aktivitas tenaga kerja penduduk untuk menghasilkan produk dan sebagai imbalannya masyarakat menerima pendapatannya. Pendapatan yang diterima masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan konsumsi akan meningkat seiring dengan pendapatan yang diterima. Orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan mengalami kesejahteraan dan terhindar dari iming-iming kemiskinan. Hal ini juga berpengaruh pada negara yaitu mengurangi kemiskinan yang terjadi.

## **2.1.7 Hubungan Antara Kemiskinan dan IPM (Indeks Pembangunan**

### **Manusia)**

Kualitas pembangunan manusia merupakan hal penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Kualitas pembangunan manusia perlu ditekankan, karena sumber daya yang berkualitas melahirkan kehidupan yang bermartabat di segala bidang, baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, kualitas manusia sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan pembangunan daerah.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor keberadaan masyarakat miskin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah menyebabkan produktivitas tenaga kerja yang rendah di antara penduduk. Produktivitas yang rendah dan pendapatan yang dihasilkan mengakibatkan sejumlah besar orang miskin. Maka dari itu pengukuran kualitas pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan capaian angka IPM. Angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang memadai. Jadi setiap kabupaten atau kota dengan IPM mendekati 100 berarti pembangunan manusia di daerah tersebut meningkat, sedangkan daerah dengan IPM mendekati nol memiliki pembangunan manusia yang buruk.

Menurut Susanti (dalam Putri, 2014), kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas sumber daya manusia tinggi yang berarti tingkat pendidikan dan kesehatan tinggi, maka produktivitas tenaga kerja tinggi dan pendapatan akan meningkat. Tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendapatan yang tinggi juga akan



menyebabkan IPM yang tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan.

## **2.2. Studi Terkait**

Penelitian yang dilakukan Ahmad Juhaidi dan Masyithah Umar (2020) tentang pernikahan dini, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan apakah masih berkorelasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis korelasi. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa pernikahan dini berkorelasi negatif dan signifikan terhadap pendidikan sedangkan angka harapan hidup juga berkorelasi negatif. Dengan demikian di Kalimantan Selatan, semakin rendah angka pernikahan dini maka tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi dan usia harapan hidup masyarakat semakin panjang. Sebaliknya, semakin tinggi angka pernikahan dini, maka semakin rendah pula tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pernikahan dini di Kalimantan Selatan memiliki korelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam jangka pendek, pernikahan dini tidak berkorelasi dengan tingkat kemiskinan karena pekerjaan masyarakat setempat bergantung pada sumber daya alam. Namun dalam jangka panjang, pernikahan dini akan berdampak pada kemiskinan, karena sumber daya alam tidak lagi digunakan sebagai sumber pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Panca Dwi Praba (2017) mencari tahu prevalensi pernikahan dini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Indonesia tahun 2012. Metode yang digunakan yaitu analisis spasial. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara umum, prevalensi pernikahan dini dan IPM berbanding terbalik di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi dengan prevalensi pernikahan dini yang tinggi cenderung memiliki karakteristik IPM yang rendah begitu pula sebaliknya. Selain itu, prevalensi pernikahan dini dan IPM di provinsi yang berdekatan cenderung memiliki karakteristik yang sama. Terdapat beberapa provinsi yang memiliki karakteristik yang kontras atau paralel antara angka perkawinan anak dengan IPM. Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Bali memiliki angka pernikahan dini terendah dengan nilai IPM tertinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari dan Heni Wahyuni (2016) mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi kualitatif respon biner. Hasil yang didapatkan yakni berdasarkan pendekatan moneter, seseorang dikatakan miskin jika memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp330,776,00 sedangkan jika menggunakan pendekatan multi dimensi, seseorang dikatakan miskin jika mengalami deprivasi pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup layak. Berdasarkan hasil regresi probit menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perempuan mengalami miskin moneter sedangkan hasil dari regresi logit menunjukkan bahwa pernikahan dini berpengaruh positif dan signifikan terhadap perempuan untuk mengalami miskin multidimensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Djamilah dan Reni Kartikawati (2014) mengenai dampak perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan wawancara dan diskusi kelompok. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan dini dan kemiskinan. Dimana dengan pernikahan dini dapat meningkatkan kemungkinan mereka para pelaku hidup dalam kemiskinan karena beban ekonomi keluarga yang meningkat dikarenakan penghasilan yang rendah namun memiliki kewajiban untuk harus menafkahi istri dan anak – anaknya.

